

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan memasuki area krisis dan mengalami kegagalan dalam penerapannya, terkhusus pada negara Dunia Ketiga (Fakih, 2009). Kegagalan tersebut sebagian besar bermuara pada korupsi, kolusi dan nepotisme yang banyak terjadi pada pemerintahan negara Dunia Ketiga. Indonesia merupakan bagian dari Dunia Ketiga yang mendapatkan dampak dari krisis serta kegagalan tersebut. Mulai dari pembangunan yang tidak merata, pembangunan yang tidak tepat sasaran, sasaran target pembangunan yang tidak menyeluruh, tidak adanya kemampuan dalam memanfaatkan fasilitas, dan sebagainya.

Krisis pembangunan menyentuh hingga Kota Yogyakarta yang terkenal sebagai kota budayanya. Budaya mulai terpinggirkan oleh pembangunan fisik yang gencar dilakukan. Tahun 2017 terdapat 25 bangunan bertingkat yang sedang dalam proses pembangunan serta 16 rencana pembangunan yang masih dalam proposal (Kresna, 2017). Krisis ini dapat terjadi karena ketersediaan lahan yang terbatas, Ruang terbuka Hijau (RTH) yang berkurang, kearifan lokal yang mulai terpinggirkan, dan sebagainya.

Tingginya angka pembangunan fisik Kota Yogyakarta diikutkan dengan tingginya angka pembangunan non-fisik Kota Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Yogyakarta tertinggi diantara seluruh kabupaten atau kota di Indonesia pada tahun 2017 (BPS DIY). Pembangunan manusia secara langsung mengikuti keadaan lingkungan Kota sebagai pusat pembangunan yang pesat.

**Gambar 1 : Tabel Indeks Pembangunan Manusia Kota Yogyakarta
Tahun 2017**

Tahun	IPM	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran
2010	82.72	74	15.68	10.88	16461.51
2011	82.98	74.02	15.75	11.01	16497.48
2012	83.29	74.04	15.82	11.22	16497.73
2013	83.61	74.05	15.89	11.36	16645.48
2014	83.78	74.05	15.97	11.39	16754.82
2015	84.56	74.25	16.32	11.41	17316.78
2016	85.32	74.3	16.81	11.42	17770
2017	85.49	74.35	16.82	11.43	18005

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Tingginya pembangunan manusia Kota Yogyakarta tidak membuat Kota Yogyakarta keluar dari lingkaran permasalahan kemiskinan, ketimpangan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Permasalahan dan isu strategis ini sudah masuk pada susunan Rencana Strategis Kota Yogyakarta tahun 2017.

Visi misi Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, 4 dari 7 misi yang dilampirkan memuat pembenahan Kota Yogyakarta pada bagian pembangunan manusia. Diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ekonomi kerakyatan, memperkuat moral, etika, budaya, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pembangunan manusia gencar dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai pengimbang lajunya angka pembangunan fisik Kota Yogyakarta.

Pada Laporan Kinerja Pemerintahan Kota Yogyakarta Desember tahun 2016, sektor pendidikan mendapat sorotan tertinggi dalam permasalahan Kota Yogyakarta. Terdapat 7 catatan permasalahan pendidikan, diantaranya biaya pendidikan yang tinggi, jaminan pendidikan, pungutan liar di luar kebijakan pendidikan, dan sebagainya. Permasalahan lainnya terdapat pada sektor sosial, Kota Yogyakarta mendapatkan permasalahan, dimana jumlah pengemis bertambah setiap hari Jumat (TribunJogja.com, 2017). Selanjutnya besarnya ketimpangan ekonomi yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Merespon permasalahan pembangunan manusia Kota Yogyakarta, tidak hanya aspek pemerintah yang menuntaskan berbagai permasalahan tersebut, namun, terdapat stakeholder sebagai pendukung penuntasan permasalahan. Diantaranya kelompok gerakan sosial. Gerakan yang melakukan aktivitas baik itu pendukung, perubahan, penolakan, bahkan menuntut pergantian kebijakan-kebijakan yang tak kunjung menuntaskan permasalahan. Gerakan yang dilakukan merupakan pergerakan yang dilakukan secara bersama-sama atau kolektif dalam merespon permasalahan, Locher (dalam Oman S., 2016:2).

Gerakan sosial perempuan 'Asiyah salah satu gerakan sosial di Kota Yogyakarta yang ikut dalam membenahi permasalahan pembangunan manusia Kota Yogyakarta. 'Aisyiyah sudah menunjukkan eksistensinya sejak tahun 1917, sudah sangat lama bergerak dalam memperhatikan keadaan perempuan, anak dan bangsa. Gerakan ini sebagai wadah bagi wanita Muhammadiyah. Sasaran permasalahan yang dikelola tidak hanya sebatas permasalahan yang memiliki latar belakang Muhammadiyah, namun, latar belakang permasalahan yang dikelola berasal dari berbagai kelompok.

‘Aisyiyah sebagai gerakan sosial menjadi bagian stakeholder dalam membantu menuntaskan berbagai permasalahan dan isu Kota Yogyakarta yang telah dikaji oleh pemerintah daerah. Melalui Pimpinan Daerah Kota Yogyakarta, ‘Aisyiyah melakukan berbagai kegiatan, diantaranya pemberdayaan ekonomi dan perlindungan sosial yang menjadi fokus utama dalam berbagai program kerja (Sasongko, 2018). Sebagai gerakan sosial ‘Aisyiyah tidak tinggal diam dalam merespon segala kejanggalan yang terjadi di Kota Yogyakarta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Noordjannah Djohantini mengatakan, ‘Aisyiyah muncul tidak hanya sebagai bentuk tameng bagi kaum perempuan, tetapi untuk umat yang dimuliakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Pada Milad ‘Aisyiyah ke-102, Pimpinan Daerah (PD) ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta mengadakan buka bersama di LAPAS Kelas II A Wirogunan. Kegiatan yang memiliki sasaran tidak hanya kaum perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk motivasi serta dakwah yang dilakukan ‘Aisyiyah, (Suara Muhammadiyah,2016).

Peran ‘Aisyiyah dalam pembangunan manusia ditunjukkan pada bidang pendidikan pula. Terdapat amal usaha pendidikan dalam berbagai bentuk yang telah dilakukan mulai dari kelompok bermain hingga perguruan tinggi ‘Aisyiyah ikut berkontribusi di dalamnya. (Qodariah, 2016).

Kesehatan merupakan permasalahan yang juga direspon oleh PD ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta. Sejak tahun 2017 PD ‘Aisyiyah melakukan program penanggulangan serta pendampingan pada pasien TB HIV bekerja sama bersama *The Global Fund* dan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Komitmen pada

program dilanjutkan dengan sosialisasi serta skrining TB rutin pada sekolah-sekolah muhammadiyah di kota Yogyakarta.

Gerakan sosial perempuan sudah mulai terlihat pergerakannya dalam merespon permasalahan yang terjadi. Tepatnya tahun 2017 menjadi sebuah tahun perubahan bagi para aktivis, terkhususnya bagi aktivis perempuan, dalam dilihat dari euforia Women's March, Heather Barr Researcher (Barr, 2018) serta dapat dilihat melalui partisipasi ribuan perempuan yang berasal dari gerakan-gerakan sosial dan warga perempuan Yogyakarta dalam memperingati *International Women's Day* (Halim, 2018).

Kedudukan yang diakui menjadi kesempatan bagi perempuan dalam menyampaikan aspirasinya. Menumbuhkan keberanian dalam menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai (Anis Farida, 2012:13). Perempuan mulai berani menunjukkan aksinya karena telah mendapatkan posisi tersendiri di kedudukan hukum, yaitu *Jurisprudensi Feminis* pembelaan terhadap hak-hak kaum perempuan (Qurrotul Ainiyah, 2017:140). Lahirnya gagasan mengenai Undang-Undang kesetaraan gender di tahun sekarang menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU). Hal ini menjadi bukti kedudukan perempuan mulai mendapat pengakuan dari negara.

Lahirnya gerakan sosial dengan basis masa perempuan tidak lain adalah pergerakan perempuan dalam memperjuangkan emansipasi, nasionalisme, dan kebebasan dari kolonialisme (Suryo Chondro dalam (Muhadjir Darwin, 2004:285)). Secara historis gerakan sosial perempuan muncul dikarenakan permasalahan gender. Pada abad ke 20 ini kesetaraan gender bukan lagi menjadi

isu utama yang selalu dibawa oleh berbagai gerakan sosial perempuan, seperti gerakan sosial perempuan dalam melawan pembangunan pabrik semen di sekitaran Pegunungan Kendeng dan gerakan sosial perempuan Dusun Dasun dalam penguatan gerakan-gerakan masyarakat, begitu pula gerakan sosial perempuan di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, gerakan sosial perempuan sudah menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam menyikapi berbagai jenis permasalahan yang terjadi. Melihat permasalahan tersebut khususnya pada permasalahan pembangunan manusia Kota Yogyakarta, bagaimanakah bentuk tanggapan yang akan dilakukan oleh gerakan sosial perempuan ‘Aisyiyah di Kota Yogyakarta? melalui latar belakang tersebut, sehingga memberikan gambaran kepada penulis untuk meneliti “Gerakan Sosial Perempuan Merespon Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta (Studi Kasus : Pimpinan Daerah ‘Aisyiah Kota Yogyakarta) tahun 2017-2018”.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana Gerakan sosial perempuan ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta dalam merespon pembangunan manusia di Kota Yogyakarta tahun 2017-2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Gerakan Sosial Perempuan dalam Menjawab isu Pembangunan Kota Yogyakarta.

- b. Untuk mengetahui bagaimana organisasi sosial perempuan ‘Aisyiyah merumuskan program dan kegiatan demi pembangunan manusia Kota Yogyakarta yang lebih baik.
- c. Untuk mengetahui bagaimana organisasi sosial perempuan ‘Aisyiyah dalam menerapkan program dan kegiatan kepada sasaran yang dituju.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi pada penelitian sejenis lainnya, serta menyumbangkan ide, pemikiran, dan juga informasi yang berkaitan dengan Gerakan Sosial khususnya dalam menggiring isu lokal.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pembaca, peneliti maupun pihak yang diteliti.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi gerakan-gerakan yang akan melakukan perubahan sosial dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan masyarakat.
3. Diharapkan pembaca dapat mengetahui struktur negara selain jajaran pemerintah dan organisasinya

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sufyan (2015) gerakan sosial lahir sebagai bentuk respon terhadap permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang membungkam keadilan serta kedaulatan rakyat yang dihasilkan oleh para pembuat kebijakan. Perlawanan yang diberikan oleh gerakan sosial berbasis masyarakat dalam sudut pandang korban dilakukan karena kebijakan yang dibuat bukan untuk kepentingan yang berpihak kepada rakyat namun, kebijakan yang dibuat hanya berpihak kepada kepentingan modal. Tiap-tiap individu Pegunungan Kendeng Utara yang terhimpun menjadi kelompok masyarakat bersama-sama merespon isu permasalahan Pembangunan Pabrik Semen. Gerakan kolektif yang dilakukan bersama komunitas lainnya menghasilkan gerakan sosial sebagai kekuatan dalam merespon permasalahan yang sedang terjadi.

Penelitian yang hampir sama dilakukan oleh Annisa Innal Fitri dan Idil Akbar (2017). Perbedaan penelitian pada basis gerakan sosial. Annisa dan Idil melakukan penelitian pada Gerakan Sosial perempuan dan lingkungan (ekofeminisme). Pentingnya peran gerakan sosial dalam melakukan penolakan pembangunan dilakukan pada penelitian ini. Kelompok perempuan memiliki respon dalam menolak karena memiliki pemikiran akan masa mendatang. Selanjutnya perempuan memiliki posisi khusus menjadi ancaman pada pembangunan Pabrik Semen. Seperti yang telah terjadi pada Kecamatan Sale sebagai kawasan pertambangan, mulai dibangunnya kafe-kafe dan warung remang-remang yang memberikan ancaman buruknya moral, kesehatan, dan bahkan rusaknya lingkungan. Ini menjadi contoh gambaran apabila tetap

terlaksananya pembangunan. Di situlah pentingnya gerakan sosial perempuan dilakukan sebagai rasionalisasi penolakan pembangunan Pabrik Semen.

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Abdi Rahmat (2014) menjelaskan aktor dalam gerakan sosial serta gerakan sosial sebagai perubahan sosial. Pada penelitian ini CSO (*Civil Society Organization*) merupakan bagian dari gerakan sosial, yaitu sebagai aktor dari gerakan sosial. Organisasi yang mandiri, voluntaristik serta tidak berorientasi pada profit merupakan bagian dari gerakan sosial. Berbagai CSO yang bergerak di bidang pendidikan memiliki satu tujuan yang sama untuk membantu permasalahan pendidikan di Indonesia. Melihat potret nyata pendidikan di Indonesia, menggerakkan CSO tanpa meminta bagian dari pihak manapun, secara sukarela membangun berbagai sistem pendidikan dengan biaya yang sangat murah hingga tanpa dipungut biaya apapun. Pada penelitian ini menjelaskan jalan buntu bagi masyarakat miskin yang ingin mencicipi pendidikan di Indonesia. Kemiskinan dapat diputuskan ketika masyarakat tersebut memiliki keterampilan, pendidikan, dan sebagainya, namun, biaya pendidikan yang sangat mahal serta akses pendidikan yang masih sangat terbatas belum menyeluruh menghambat masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. CSO berinisiatif membangun sekolah-sekolah dengan biaya rendah dan bebas biaya serta sekolah yang dapat diakses dimana pun.

Gerakan sosial memiliki peran mengubah keputusan dan juga kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan oleh Dimpos Manalu (2007). Gerakan sosial masyarakat Porsea Toba Samosir menuntut pabrik bubur kertas agar berhenti beroperasi. Hal ini dilakukan karena selama pembangunan hingga proses produksi memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Buruknya

lingkungan memberikan dampak buruk terhadap kesehatan serta menurunnya pendapatan masyarakat lokal. Gerakan sosial yang didominasi oleh kaum perempuan ini melakukan perlawanan sejak tahun 1990an, pada tahun 2000 tuntutan tersebut dikabulkan yang diputuskan melalui sidang kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid-Megawati.

Sama halnya penelitian yang dilakukan oleh Muhadjir Darwin (2004), penelitian yang dilakukan mengenai sejarah gerakan perempuan dari masa ke masa. Letupan gerakan sosial berbasis perempuan semakin terlihat semenjak runtuhnya masa orde baru yang membawa permasalahan begitu besar. 'Aisyiyah dan Fathayat memantik letupan gerakan sosial berbasis perempuan tersebut. Dimana gerakan sosial yang berbasis perempuan ini sangat proaktif dalam menyuarakan keberadaan perempuan serta memperjuangkan hak-hak bagi perempuan. Aksi proaktif terhambat dikarenakan kurangnya massa serta terbatasnya akses untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lelly Qodariah (2016), memaparkan hasil penelitian mengenai dinamika Organisasi 'Aisyiyah dalam bidang pendidikan serta perubahan sosial bagi kaum perempuan. Menjelaskan bagaimana 'Aisyiyah mengelola, menjalankan serta mempertahankan eksistensinya di dunia pendidikan pada abad 20an. Menjalankan sistem pendidikan ilmu agama dan ilmu umum, dengan menambahkan konsep modern dalam pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan posisi sejajar dengan laki-laki khususnya dalam menempuh pendidikan. Beberapa cara yang ditempuh 'Aisyiyah dalam mengelola, menjalankan serta mempertahankan pendidikan pada abad 20an.

Melihat peran 'Aisyiyah pada bidang perekonomian dapat ditemukan pada penelitian Puspita handayani (2016). 'Aisyiyah melakukan perannya dalam pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan melalui ekonomi kreatif masyarakat Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Pemberdayaan tidak hanya dilakukan pada saat proses produksi, pemberdayaan mulai dilakukan dari tahap awal hingga akhir. Melakukan analisis peluang, hambatan, kebutuhan produksi hingga model pengembangan selalu didampingi oleh Organisasi 'Aisyiyah.

Berdasarkan studi terdahulu, maka penelitian yang akan diambil oleh penulis adalah Gerakan Sosial Perempuan dalam Merespon Pembangunan. Pada penelitian ini penulis memiliki fokus penelitian pada gerakan sosial perempuan di Kota Yogyakarta, yaitu Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini penulis akan meneliti bagaimana 'Aisyiyah sebagai gerakan sosial perempuan merespon pembangunan manusia melalui pemberdayaan pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan sosial di Kota Yogyakarta dengan mengacu pada Rencana Strategis Kota Yogyakarta tahun 2017. Penulis meneliti 'Aisyiyah sebagai gerakan sosial yang ikut andil dalam melakukan perubahan sosial di lingkungan yang bersangkutan.

1.6. Kerangka Dasar Teori

1.6.1. Teori Gerakan Sosial (*Social Movements*)

1.6.1.1. Perbedaan Gerakan Sosial dan Perilaku Kolektif

Gerakan sosial sering kali disandingkan dengan istilah perilaku kolektif. Macionis (dalam Oman S., 2016:1) mengatakan gerakan sosial (*social movements*) merupakan output terpenting dari bentuk perilaku kolektif (*collective behavior*). Locher (dalam Oman S. 2016:2)

menkonsepkan perbedaan antara gerakan sosial dengan perilaku kolektif, diantaranya :

a. Aspek Pengorganisasian (*Organized*)

Letak perbedaan gerakan sosial dan perilaku kolektif pada pengorganisasian massa. Gerakan sosial (*social movements*) adalah suatu aktivitas yang terorganisir. Perilaku kolektif dalam melakukan kegiatan begitu cepat, hanya bersifat sementara dan adanya kebebasan dalam mengekspresikan kegiatan, sedangkan gerakan sosial memiliki taktik dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dalam menjalankan kegiatan sangat terorganisir, dengan demikian kegiatan tidak cepat berakhir, dan dapat dirasakan dalam waktu yang berjangka (Oman S. 2016:2).

b. Aspek Pertimbangan (*Deliberate*)

Segala bentuk partisipasi dalam suatu kegiatan sangat dipertimbangkan terlebih dahulu oleh kelompok gerakan sosial. Mempertimbangkan jumlah partisipan, keikutsertaan partisipan dalam kegiatan, output kegiatan, materi, permasalahan kegiatan, publikasi yang akan menarik dukungan untuk kegiatan dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena segala partisipasi kegiatan mengatasnamakan kelompok. Sebagian besar poin pertimbangan tersebut tidak dilakukan pada kelompok perilaku kolektif.

c. Aspek Daya Tahan (*Enduring*)

Gerakan sosial memiliki daya tahan yang lebih lama dari pada perilaku kolektif. Gerakan sosial memiliki misi tersendiri bahkan tujuan dan sasaran yang jelas, sehingga, gerakan sosial memiliki pemetaan waktu

tersendiri dalam mencapai misi-misinya. Lain halnya dengan perilaku kolektif, perilaku kolektif hanya terjadi beberapa saat dengan jangka waktu yang lebih pendek dibandingkan gerakan sosial. Perilaku kolektif tidak memiliki pemetaan waktu, karena hal tersebut bisa saja terjadi dengan waktu tiba-tiba, seperti kerusuhan, *fashion mode*, dan penggalangan dana.

Tabel 1. Perbedaan antara Gerakan Sosial dan Perilaku Kolektif

Aspek	Bentuk Perilaku Kolektif (<i>Collective Behavior</i>)	
	Gerakan Sosial (<i>Social Movements</i>)	Bentuk Lainnya (<i>Crowd, Riot, Rebel, Fads</i>)
Pengorganisasian (<i>Organized</i>)	Terorganisir dengan baik, pembagian <i>job desk</i> yang jelas, strategis sistematis, dan adanya pemimpin.	Tidak terorganisir, kerja sama antar kelompok dan partisipan bersifat sementara. Tidak jelasnya pemimpin.
Pertimbangan (<i>Deliberate</i>)	Melalui berbagai pertimbangan, partisipasi dilakukan atas dasar pertimbangan dan kesadaran, melakukan publikasi kegiatan.	Tidak melakukan pertimbangan secara matang terlebih dahulu, partisipasi bukan atas dasar pertimbangan dan kesadaran, publikasi tidak masif.
Daya Tahan (<i>Enduring</i>)	Relatif memiliki masa aktif yang lama.	Bersifat sementara atau sesaat.

Sumber: Locher (dalam Oman S., 2016:3), diolah kembali.

1.6.1.2. Gerakan Sosial

Studi gerakan sosial khususnya di Indonesia memiliki kiblat teori kepada pandangan Rajendra Singh (Oman S., 2016:8). Menurut

Singh secara umum studi Gerakan Sosial dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

a. Klasik

Tradisi klasik meliputi sebagian besar studi-studi yang dilakukan pada perilaku kolektif, yaitu (Rajendra, 2010: 111): kerumunan (*crowd*), kerusuhan (*Riot*), dan penolakan atau pembangkangan (*rebel*). Akar konseptual pada studi gerakan sosial kelompok klasik dan tindakan kolektif sebagian terletak dalam psikologi sosial klasik. Rajendra Singh memberikan gambaran sosial tentang kerumunan (*crowd*) berupa kerumunan manusia secara kolektif terdiri dari individu-individu merespon dan menanggapi berbagai isu atau permasalahan dalam lingkup kepentingan umum. Pengertian kerumunan (*crowd*) tidak seperti yang dikatakan C.H. Cooley (dalam Rajendra S., 2010:113) yang memiliki arti berhadap-hadapan, melainkan lebih menyerupai kelompok yang saling merapat atau berdesak-desakan.

Karya-karya psikologi klasik menjelaskan kerusuhan (*crowd*) umumnya dibangun atas gambaran suatu kelompok yang berbahaya dengan hanya berbentuk sementara, sedikitnya partisipasi, emosi yang mendidih, menimbulkan kerusakan dalam masyarakat, serta kapasitasnya untuk menghilangkan akal sehat dan tanggung jawab. (Rajendra S., 2010:115).

Psikologi sosial klasik mengalami revisi radikal untuk memberi batasan pada kehancuran. Melakukan berbagai penelitian dan pengumpulan data historis, pada abad ke-18 sampai awal abad ke-20

melalui sejarah Perancis dan Inggris, para sejarawan sosial berhasil kembali menerangkan kerusuhan (*crowd*) dalam konsep baru secara bersama-sama. Pada analisis baru ini kemudian lahir pandangan baru para sejarawan mengenai kerusuhan (*crowd*). *Crowd* dilakukan sebagai entitas sosial, terciptanya *crowd* dikarenakan suatu alasan yang sedang terjadi dan ini merupakan suatu tindakan yang dihasilkan sebagai peran masyarakat dalam sejarah.

Aksi kerusuhan (*crowd*) digambarkan selama abad ke-18 dan ke-19 membuktikan bahwa konstruksi psikologis sosial klasik mengenai kerusuhan (*crowd*) sebagai entitas yang gampang berubah dan tak terencana adalah terlalu berlebihan, tendensius, dan juga keliru. (Oman S., 2010:120).

M.S. Gore menunjukkan pemikirannya mengenai masyarakat dan gerakan sosial yang independen dan otonom, pemikiran dominan di Eropa dalam disiplin ilmu sosial kontemporer membuat pemahaman M. S. Gore mengenai gerakan sosial masih digunakan hingga sekarang. M.S. Gore (dalam Rajendra S., 2010:185) menjelaskan poin-poin penting dalam memaknai dan mendefinisikan gerakan sosial sebagai berikut :

1. Gerakan-gerakan sosial ada kaitannya dengan kerangka nilai dari masyarakat, dimana pada hakikatnya masyarakat digerakkan oleh perjuangan untuk mendapatkan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan sosial.

2. Gerakan sosial merupakan agen historis, ditunjukkan melalui aksi-aksi perubahan sosial yang berusaha menciptakan kerangka nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Struktur gerakan sosial terus berusaha mewujudkan kebebasan dan keadilan.
4. Terdapatnya aktor-aktor dalam menjalankan fungsinya sebagai agen historis yang akan menjalankan proses dengan sebagai arahan dalam mewujudkan perubahan-perubahan ke arah yang diinginkan sesuai dengan nilai masyarakat.

b. Neo-klasik

Tulisan-tulisan mengenai studi gerakan sosial neo-klasik dipublikasikan setelah tahun 1950-an. Studi neo-klasik membagi gerakan sosial ke dalam dua model gerakan sosial klasik, yaitu : Model Fungsionalis dan Model Dialektika Marxis. Kontribusi sosiolog yang terlibat pada studi ini tidak hanya para sosiolog Barat, terdapat peran sosiolog india di dalamnya.

1. Model Fungsionalis

Model fungsionalis neo-klasik yang konvensional memandang masyarakat sebagai sebuah “keseluruhan organis” yang memiliki rasionalitas untuk melestarikan dirinya (Rajendra S., 2010:205). Model fungsionalis terdiri dari sebagian besar teori yang melihat lahirnya gerakan sosial sebagai masalah bagi masyarakat atau sebagai gejala penyakit yang terjadi pada lingkungan masyarakat (Mustain Mashud:2).

Fungsionalisme disebut juga fungsionalisme struktural karena penekanan pada keperluan atau kebutuhan, sistem sosial fungsional harus terpenuhi bagian-bagiannya sebagai bentuk keberlangsungan serta struktur yang telah ada. Fungsionalisme melihat tatanan masyarakat sebagai kehidupan sosial, saling membutuhkan satu dan lainnya bekerja sama guna menciptakan keseimbangan. Unsur terpenting fungsionalisme adalah keseimbangan.

Penekanan pada fungsionalisme melalui kerja sama dalam menciptakan keseimbangan merupakan satu kesatuan masyarakat dan segala sesuatu yang didapat adalah milik bersama. Segala sesuatu yang menimbulkan konflik sehingga mengganggu keharmonisan masyarakat hal yang dihindarkan dari fungsionalisme.

Pemikiran fungsionalisme sebenarnya merupakan sosiologi kemapanan, ketertiban sosial, stabilitas sosial, kesepakatan, keterpaduan sosial, kesetiakawanan, pemuasan kebutuhan dan hal-hal yang bersifat empiris (Mansour, 2009:32).oleh sebab itu pendekatan fungsionalisme cenderung realis.

2. Model Dialektika Marxis

Model dialektika Marxis memandang masyarakat sebagai sebuah totalitas yang utuh, terdiri dari kelas-kelas dan saling bertarung, namun, masih tetap sebagai totalitas, yang secara niscaya terlibat dalam proses dialektika materialistik dari sejarah sampai pada akhirnya mencapai tujuan akhirnya dalam revolusi kelas.

Marxisme tradisional memiliki asumsi bahwa revolusi merupakan suatu kebutuhan. Revolusi dilakukan karena keadaan masyarakat proletar khususnya semakin memburuk terutama yang berhubungan dengan produksi sehingga melahirkan krisis ekonomi, depresi dan kehancuran.

Merespon keadaan, kelas-kelas masyarakat bersatu dalam kelompok terorganisir dalam gerakan sosial untuk menuntaskan permasalahan maka dilakukan penyampaian tuntutan merevolusi keadaan.

Generasi baru Marxis yaitu gerakan kiri baru, melakukan kritik pada konsep Marxis tradisional. Bagi generasi baru Marxis tidak hanya ekonomi yang menjadi aspek terpenting namun, terdapat aspek lainnya juga apabila ingin mewujudkan perubahan sosial.

c. Gerakan Sosial Baru (Kontemporer)

Tahun 1960an dan 1970an merupakan tahun kemunculan Gerakan Sosial Baru khususnya bagian Eropa dan Amerika. Gerakan yang dilakukan memiliki cakupan lebih luas seputar isu humanis, kultural, dan non-materialistik. Gerakan Sosial baru memiliki tujuan dan nilai-nilai gerakan yang berbeda, secara esensial bersifat universal, yaitu memberikan perlindungan serta mempertahankan kondisi kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Gerakan Sosial Baru tidak tertarik pada gagasan revolusi. Gerakan ini pada umumnya tidak mendukung potensi munculnya pemberontakan petani atau perjuangan agraria. Berbeda dengan

kelompok gerakan sosial klasik dan neo-klasik, ideologi pembahasan tidak hanya terbatas pada anti-kapitalisme, revolusi kelas, dan perjuangan kelas (Oman S., 2016:9). Ideologi yang dibahas lebih bersifat plural, meluaskan arena pembahasan seperti : anti rasisme, anti nuklir, pelucutan senjata, feminisme, *environmentalis*, kebebasan sipil dan sebagainya.

Gerakan sosial baru bisa diperlakukan sebagai refleksi pemberontakan kultural individu kontemporer yang menentang meningkatnya mekanisasi sistem kontrol dan pengawasan oleh negara terhadap hak privat masyarakat. Perkembangan dari masyarakat modernitas menuju masyarakat postmodernitas memberikan gambaran keadaan gerakan sosial pada masanya, yakni Gerakan Sosial Lama (Klasik dan Neo-Klasik) berubah kepada Gerakan Sosial Baru (Kontemporer) (Oman S., 2016:10).

Secara khusus Rajendra Singh (2010) menjelaskan ciri-ciri gerakan sosial baru atau kontemporer sebagai berikut:

1. Konsepsi ideologis berasumsi pada mekanisme sistem kontrol kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh negara.
2. Tidak menggunakan paradigma Marxis dalam menjelaskan konflik.
3. Membangkitkan isu-isu yang berhubungan dengan demoralisasi kehidupan sehari-hari.
4. Bersifat pluralitas, artinya mencita-citakan beragam tujuan dan menyuarakan beragam kepentingan (tidak sebatas kelas).

1.6.2. Feminisme

Feminisme merupakan sekumpulan pemikiran, pendirian dan aksi yang berangkat dari kesadaran, asumsi, dan kepedulian terhadap ketidakadilan, ketidaksetaraan, penindasan atau diskriminasi terhadap kaum perempuan, (Mansour F., 2009:128). Feminisme juga merupakan sebuah gerakan untuk menghentikan seluruh ketidakadilan juga diskriminasi, menjelaskan mengapa ketidakadilan dan diskriminasi itu terjadi.

Feminisme tidak hanya sekedar ideologi maupun teori kritik, feminisme telah mampu memproduksi teori perubahan sosial dan menjadi dasar dalam kritik pembangunan. Berkembangnya feminisme menjadi kritik pembangunan sejak terlaksananya suatu konferensi tentang pengintegrasian kaum perempuan dalam ekonomi yang diselenggarakan di Wesley College, Amerika Serikat, (Mansour F., 2009:130). Dari hasil konferensi inilah lahirnya urusan *Women in Development*.

a. Feminisme Liberal

Kaum liberal melahirkan asumsi-asumsi tentang kaum perempuan dalam teori modernisasi dan pembangunan. Dalam asumsi tersebut melahirkan anggapan kaum perempuan dianggap masalah yang lebih besar dibandingkan dengan kaum laki-laki. Bagi kaum liberal, pembangunan dan modernisasi, teknologi, maupun sistem ekonomi memberi peluang yang luas, namun, memang hanya ada modern, kreatif,

rasional, dan efisiensi lah yang akan mampu memanfaatkan kesempatan itu.

Dominasi kaum lelaki pada nilai-nilai utama yaitu, kultur, politik, dan ekonomi menjadi hambatan bagi perempuan dalam pembangunan, terjadinya diskriminasi.

Kritik feminis liberal terhadap pembangunan dan modernisasi dimulai sejak awal tahun 1970an. Berdasarkan analisis kaum feminis liberal, kaum feminis liberal mengajukan solusi untuk menghentikan proses marginalisasi kaum perempuan dengan memperjuangkan perubahan hukum dan peraturan yang memungkinkan kaum perempuan memiliki akses serta kontrol yang sama pada lingkungan pekerjaan dan juga gaji/tunjangan.

Bagi kaum feminis liberal, tujuannya adalah meningkatkan partisipasi yang adil di dalam sistem yang telah diciptakan dan bukan mengubah sistem yang telah ada. Oleh sebab itu argumen utama feminis liberal adalah egalitarian.

b. Feminisme Marxis

Marxisme meletakkan asumsinya bahwa struktur produksi merupakan penanda dari rendahnya status kaum perempuan. Dua komentar Marxisme dalam membahas kaum perempuan adalah, pertama, hubungan suami istri dapat dianalogikan sebagai hubungan kaum proletar dan kaum borjuis, dimana kaum perempuan digambarkan sebagai kaum borjuis. Kedua, kemajuan masyarakat diukur dari kemajuan kaum perempuan dalam lingkungan masyarakat tersebut, perempuan

digambarkan sebagai tolak ukur yang penting dalam menilai kemajuan masyarakat.

Feminis Marxis pada umumnya mendasar dari teori Engels tentang sejarah pra kapitalisme, menjelaskan bahwa jatuhnya status perempuan bukanlah disebabkan perubahan teknologi melainkan perubahan organisasi kekayaan. Feminis Marxis memiliki asumsi penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari sistem eksploitatif yang bersifat kultural, yaitu kapitalisme. Kaum perempuan menjadi buruh keluarga yang tak perlu di bayar, bahkan sangat berperan dalam memproduksi buruh, sehingga menyebabkan murahnya harga tenaga kerja serta jaminan akan selalu tersedianya buruh. Penindasan ini telah terjadi sejak munculnya *private property*.

Menurut Largulia dan Demoulin (dalam Mansour F., 2009:140) runtuhnya penindasan perempuan hanya terjadi apabila perempuan memasuki ranah produksi dan berhenti dari urusan rumah tangga, tetapi proses ini hanya akan terjadi melalui industrialisasi. Dengan kata lain feminis marxis berpandangan status perempuan akan berubah hanya melalui revolusi sosial dan penghapusan pekerjaan domestik.

c. Feminisme Sosialis

Feminis sosialis sangat skeptis terhadap asumsi dari golongan Marxis. Feminis sosialis meletakkan dasar status perempuan tidak hanya berdasarkan produksi maupun ekonomi saja. Perempuan yang hanya

berbekal ekonomi dan aktif di produksi juga mengakibatkan kaum perempuan menjadi budak produksi tersebut. Dengan begitu meningkatnya status perempuan dalam ekonomi tanpa didampingi perubahan norma kultural di rumah tangga, akan berlipat ganda kaum perempuan dibandingkan naiknya status atau kekuasaan perempuan.

Marx berpandangan sosialisme tidak harus menghancurkan *privilege* kelas, tetapi perbedaan kelas itu sendiri yang harus dihancurkan. Sebagaimana tesis feminis radikal yang dilakukan oleh Shulamith Firestone yang memiliki pandangan bahwa biologi menentukan nasib oleh sebab itu biologi harus diubah. Menurut Firestone (dalam Mansour F., 2009:142) perjuangan feminis haruslah tidak berhenti pada penghapusan *sex privilege*, tetapi pada “perbedaan sex” itu sendiri.

Feminis sosialis menilai ketidakadilan bagi kaum perempuan bukan karena perbedaan biologis antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan terhadap perbedaan tersebut yang menjadi batas dan limitasi ruang gerak bagi perempuan.

Feminis sosialis mengkritisi feminis marxis, penindasan pada kaum perempuan tidak hanya berdasarkan kegiatan reproduksi dan produksi, melainkan ada pengaruh konstruksi sosial di dalamnya.

1.6.3. Teori S-O-R

Teori S-O-R merupakan teori yang semula berasal dari pengaruh disiplin psikologi yang beraliran behavioristik (Deddy Mulyana, 2008:143). S-O-R menjadi bagian dari disiplin komunikasi dikarenakan objek material disiplin psikologi dan disiplin komunikasi memiliki kesamaan yaitu manusia yang meliputi komponen-komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afeksi dan konasi (Onong, 2000:254).

Teori ini menjelaskan bagaimana respon dihasilkan dari suatu rangsangan. Melalui teori ini, respon pada manusia dalam bentuk perilaku dikarenakan adanya faktor dari luar dirinya atau eksternal, perilaku yang ditimbulkan bukan berdasarkan kehendak, keinginan serta kemauan seseorang atau internal.

Unsur-unsur dalam teori S-O-R terdiri dari *Stimulus* (pesan), *Organism* (komunikan), dan *Response* (efek). Istilah S-O-R sering ditemukan dengan istilah S-R (*Stimulus-Response*), namun, menurut Fisher, *Response* (efek) tidak dapat terjadi apabila tidak adanya tekanan serta intervensi yang dihasilkan dari *Organism* (komunikaan). Oleh sebab itu istilah S-O-R lebih sering digunakan.

Stimulus (pesan) dapat diterima ataupun ditolak oleh *organism* (komunikan). Diterimanya pesan dilihat dari perhatian yang diberikan oleh komunikan kepada pesan. Penentuan tahap selanjutnya dapat dilihat dari komunikan sebagai proses selanjutnya. Setelah diterima oleh komunikan, kemudian komunikan mengolah pesan untuk menentukan sikap yang akan diberikan.

Teori ini memberikan asumsi bahwa kualitas pesan yang dikelola oleh komunikan menentukan perilaku yang akan dihasilkan. Artinya kualitas suatu komunikan dan unsur didalamnya menjadi penentu dalam menghasilkan perilaku terhadap pesan. Kredibilitas, kepemimpinan, nilai, ideologi, pada seseorang atau kelompok menjadi unsur penentu dalam perilaku yang akan dihasilkan. Perilaku yang dihasilkan dijadikan sebagai bentuk sikap dalam menanggapi pesan. Hal ini terjadi pada tahapan *response* (efek).

1.6.4. Pembangunan Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*)

Pembangunan SDM merupakan cara untuk mencapai pertumbuhan dengan pemerataan Irma Adelman (dalam Mansour F., 2009:58). Pembangunan manusia yang berkualitas dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kemajuan yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia (Bappenas:2016).

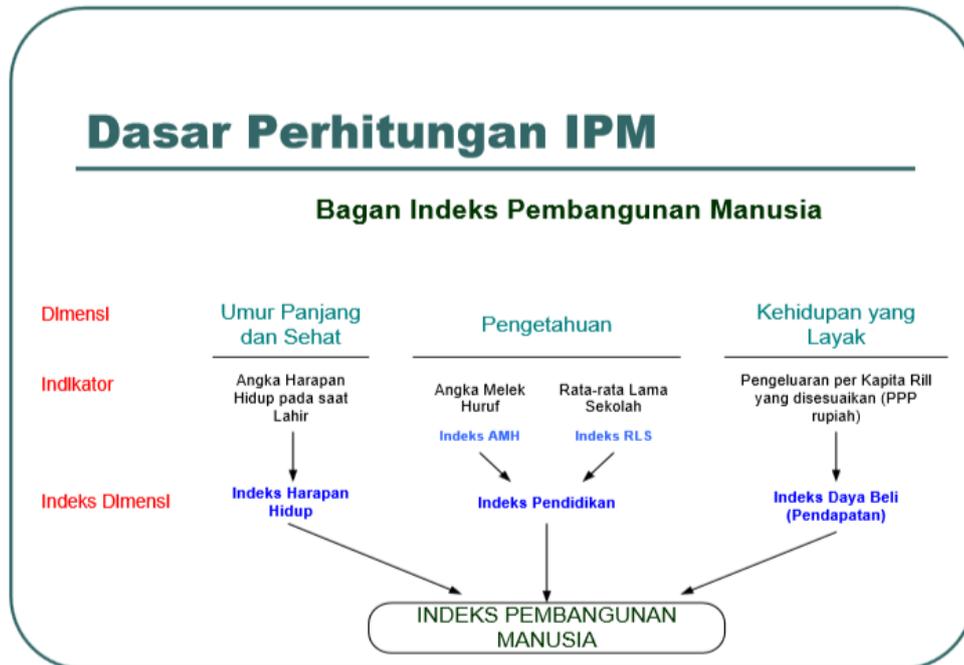
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melakukan pengukuran dengan perbandingan pada bidang pendidikan, harapan hidup, dan standar hidup untuk semua negara (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015). IPM mulai diperkenalkan pada tahun 1990 oleh salah satu lembaga bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

1.6.4.1. Komponen dalam Pembangunan SDM

Pada masa saat ini penilaian keberhasilan pembangunan suatu negara tidak hanya saja berdasarkan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dimiliki suatu negara, tetapi keberhasilan pembangunan juga dilihat dari tingkat kualitas pembangunan sumber daya manusia. Tingkat penilaian kualitas pembangunan sumber daya manusia ini dicerminkan melalui IPM. Berikut aspek penilaian IPM berdasarkan dari tujuan akhir pembangunan (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015) :

1. Masa hidup yang diukur dengan angka harapan hidup.
2. Pengetahuan yang dinilai melalui kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah.
3. Standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan dengan daya beli.

Gambar 2. Dasar Perhitungan IPM



Sumber: Buku Panduan Kongres Nasional Pembangunan Manusia Indonesia, Menko Kesra dan TKPK (dalam Suripto, 2011).

Komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi poin-poin komponen apa saja yang harus disentuh dalam pembangunan sumber daya manusia. Bappenas menjabarkan pembangunan manusia mencakup komponen:

- a. Pendidikan, komponen ini merupakan bagian dari dasar perhitungan pengetahuan pada IPM.
- b. Kesehatan dan Gizi Masyarakat, komponen ini merupakan bagian dari dasar perhitungan umur panjang dan sehat pada IPM.
- c. Perumahan dan Kawasan Pemukiman, komponen ini merupakan bagian dari dasar perhitungan kehidupan yang layak pada IPM.

- d. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak, komponen ini merupakan bagian yang mencakup ketiga dasar perhitungan pada IPM.
- e. Jaminan Sosial, , komponen ini merupakan bagian dari dasar perhitungan kehidupan yang layak pada IPM.

1.7. Definisi Konseptual

Definisi konseptual pada penelitian digunakan sebagai bentuk penggambaran dan pembatasan konsep satu dengan yang lainnya terkait dengan permasalahan yang hendak diteliti, adapun definisi konseptual pada penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan sekumpulan individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang terorganisir, terstruktur, dan memiliki tujuan serta nilai dalam merespon permasalahan, melindungi masyarakat dan mempertahankan kondisi masyarakat ke arah yang lebih baik.

- b. Respon

Respon merupakan tindakan, tanggapan ataupun balasan terhadap rangsangan ataupun stimulus yang terjadi sebagai wujud dari bentuk aksi dan reaksi dalam kehidupan bermasyarakat.

- c. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia merupakan pembangunan yang dilakukan pada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan juga kemajuan bagi manusia.

1.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan indikator-indikator turunan sesuai dengan definisi konsep yang telah ditetapkan. Definisi operasional yang telah ditentukan digunakan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian gerakan sosial dalam merespon pembangunan manusia di Kota Yogyakarta. Penulis merujuk pada teori gerakan sosial oleh Rajendra Singh dan Locher dalam menyusun definisi operasional. Adapun definisi operasional sebagai berikut:

2.1.1. Pengorganisasian

- a. Adanya pemimpin organisasi yang jelas.
- b. Penyusunan rencana secara strategis
- c. Memiliki tupoksi setiap bagian.
- d. Terlibat hingga akar rumput.

2.1.2. Pertimbangan

- a. Terdapat media publikasi.
- b. Mencari dukungan dari masyarakat.
- c. Mempertimbangkan keberadaan formal negara dan ekonomi pasar.
- d. Adanya partisipan yang terlibat dengan kesadaran penuh.

2.1.3. Daya Tahan

- a. Tidak bersifat sesaat atau sementara.
- b. Memiliki anggota yang relatif tetap.

2.1.4. Tujuan dan Nilai

- a. Adanya visi misi organisasi atau gerakan.
- b. Merespon permasalahan strategis masyarakat sipil.

- c. Inovasi dalam merespon permasalahan.
- d. Membangkitkan isu komunitas atau masyarakat.
- e. Tidak bersifat anarki atau memberontak.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Menurut Dharminto jenis penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam (Pupu Saeful, 2009:2) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Oleh sebab itu penelitian kualitatif digunakan dalam meneliti kehidupan sosial, masyarakat, perilaku, lembaga/komunitas/organisasi, dan sebagainya.

Penelitian ini mengumpulkan data dari cara-cara berfikir formal serta argumentatif dalam menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya jawaban dianalisis beserta pemaparan fakta secara sistemis dilakukan secara deskriptif.

1.9.2. Unit Analisa Data

Unit analisa data sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang akan diteliti. Unit analisa data pada penelitian Gerakan Sosial Perempuan Merespon Pembangunan Kota Yogyakarta adalah Organisasi Masyarakat. Pada penelitian ini adalah Organisasi perempuan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi).

1.9.3. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung yaitu melalui observasi atau pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. data primer di dapat langsung melalui proses wawancara serta observasi ke Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen secara tidak langsung. Data diperoleh melalui gabungan dari penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian ini didapatkan melalui buku cetak, *e-book*, jurnal, produk hukum, dokumen-dokumen kelembagaan dan website resmi lembaga dan organisasi.

1.9.4. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi penelitian difokuskan pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta, Jalan Sultan Agung Nomor 14 Kota Yogyakarta, serta beberapa lokasi pendukung lainnya apabila dibutuhkan.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan data serta informasi terkait pertanyaan penelitian. Pada abad ke-20 wawancara menjadi puncak pencapaian karya jurnalistik yang

hebat sehingga teknik ini masih berlaku hingga sekarang, Suhandang dalam (Fandi Rosi, 2016).

Pengumpulan jawaban atas pertanyaan penelitian melalui tahap wawancara kepada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan langsung kepada narasumber yang bersangkutan sesuai dengan judul penelitian. Sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta tercapai tujuan penelitian.

b. Teknik Observasi

Adler & Adler (dalam Hasyim, 2016:26) menyebutkan bahwa teknik observasi merupakan bagian fundamental dalam melakukan penelitian jenis kualitatif. Observasi adalah teknik pengumpulan data mengenai keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa penelitian, yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Selanjutnya Hasyim Hasanah mengatakan observasi yang telah dilakukan untuk melengkapi informasi ilmiah atas gejala sosial yang terjadi (2016:28). Peneliti melakukan observasi langsung ke Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan atau gambar dapat dilihat, dibaca dan dapat dirasakan. Kumpulan data ini fakta dan tersimpan dalam berbagai bentuk bahan (Aunu Rofiq, 2013:88). Pada penelitian ini data dokumen berupa Rencana Strategis Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, Lakip Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2017, Lakip Dinas Kesehatan Kota

Yogyakarta tahun 2017, Lakip Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2017 , dan Lakip Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Kota Yogyakarta tahun 210, dokumen pembangunan manusia BPS Kota Yogyakarta tahun 2017, dan data yang bersangkutan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman, sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik-teknik yang telah dilakukan. Pengumpulan data dari hasil wawancara serta observasi lapangan melalui Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta serta pengumpulan data-data visual melalui teknik dokumentasi baik berupa tulisan maupun gambar dari Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta, Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta terkait (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi).

b. Reduksi Data

Reduksi data dari hasil keseluruhan data yang telah dikumpulkan. Melakukan penggolongan dari keseluruhan data. Setelah melakukan penggolongan kemudian data dibuat menjadi sebuah ringkasan untuk mempermudah peneliti menarik kesimpulan (Sugiyono, 2005).

c. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, melakukan analisis antar variabel penelitian dan juga melakukan *check and balance* atas keseluruhan data yang telah terkumpul. Data yang telah direduksi dilakukan perbandingan dengan berbagai data yang berasal dari literatur atau teori. Selanjutnya data disajikan sesuai dengan sistematika yang telah disusun. data disusun dan diolah menjadi lebih halus sebagai tulisan hasil dari penelitian yang nantinya dapat dibaca dan dipahami dengan baik.

d. Penarikan Kesimpulan

Melalui data yang telah dianalisis penulis memilih data untuk dijadikan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sehingga penelitian dapat menjawab sesuai dengan rumusan masalah.